

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini terkonsentrasi pada mekanisme dan upaya mobilisasi yang dilakukan oleh kelompok pendukung kolom kosong yaitu Jaringan Kotak Kosong (JKK) di Kota Tangerang dan Relawan Kolom Kosong (Rewako) di Kota Makassar dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Peneliti dengan menggunakan teori partisipasi dan mobilisasi Huntington, berusaha menangkap fenomena yang cenderung baru sejak 2015. Bahwa ada kelompok-kelompok yang lahir sebagai akibat dari hadirnya calon tunggal di Pilkada berdasarkan putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015. Meningkatnya pertumbuhan kelompok ini pada Pilkada 2018 sebetulnya menjadi peringatan kepada elemen tertentu dalam menjalankan proses demokrasi. Terlebih lagi di tahun yang sama, terdapat satu daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong yaitu kota Makassar. Hal ini kemudian peneliti kaji sebagai perkembangan demokrasi lokal dalam konteks mobilisasi massa di Pilkada. Proses mobilisasi yang dilakukan oleh Rewako dan JKK mampu memberikan peran khusus sebagai bukti perlawanan terhadap oligarki di tingkat elit politik.

Kemenangan Rewako di Kota Makassar tak hanya menorehkan sejarah baru dalam pemilu tanah air, melainkan menjadi pukulan telak kepada elemen-elemen yang terlibat seperti KPU sebagai penyelenggara, Partai sebagai peserta, dan Elit politik sebagai pendukung. Kemenangan tersebut tak lepas dari masifnya

peran dari Rewako dan kelompok pendukung kotak kosong lainnya yang merupakan mantan dari pendukung Danny Pomanto dalam memobilisasi serta mempersuasi masyarakat kota Makassar. Juga figur Danny selama menjadi walikota hingga sekarang masih disukai oleh sebagian besar masyarakat Kota Makassar. Berbeda dengan Makassar, gerakan JKK di Kota Tangerang tidak ditemukan pengaruh dari elit politik. Hanya saja sebagian dari anggota JKK adalah pendukung Sachrudin kala masih menjadi bakal calon walikota, yang kemudian kecewa karena bergabung dengan Arief Wismansyah sebagai calon wakil walikota. JKK tetap mampu melakukan konsolidasi ke seluruh kecamatan hingga terbentuk koordinator kecamatan, kelurahan, dan ranting. Meskipun kalah, JKK mampu memberikan perlawanan kepada calon tunggal.

Berdasarkan teori Huntington, Rewako dan kelompok pendukung kotak kosong di Makassar dinilai oleh peneliti sebagai bentuk mobilisasi patron-klien. Sebab Danny Pomanto sebagai kandidat pilihan mereka digagalkan, sehingga mereka secara otomatis berupaya memenangkan kotak kosong. Sedangkan JKK di Tangerang, mereka menjadikan masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai sasaran dari upaya mobilisasinya dengan melakukan sosialisasi. Mekanisme gerakan mereka yang memberikan kesempatan pada masyarakat kelas menengah ke bawah untuk cerdas terlibat dalam pemilu, membuat peneliti menganggap proses mobilisasi mereka sebagai mobilisasi mesin politik. Selain itu, peneliti juga menegaskan bahwa kelompok kotak kosong akan semakin masif apabila perilaku politik partai dan elit politik masih melakukan tindakan yang melanggengkan oligarki politik. Kajian yuridis, tentang keberadaan kotak kosong juga ditekankan

peneliti, bahwa perlu adanya pembaharuan akademis dalam menyusun peraturan serta undang-undang kepemiluan, sehingga kelompok-kelompok seperti ini diberikan ruang lebih untuk berperan. Dengan begitu, tingkat partisipasi masyarakat yang kian menurun akan mulai terkontrol, dan mampu mengembalikan amanat demokrasi yang memberikan kedaulatan seutuhnya dari, oleh, dan untuk rakyat.

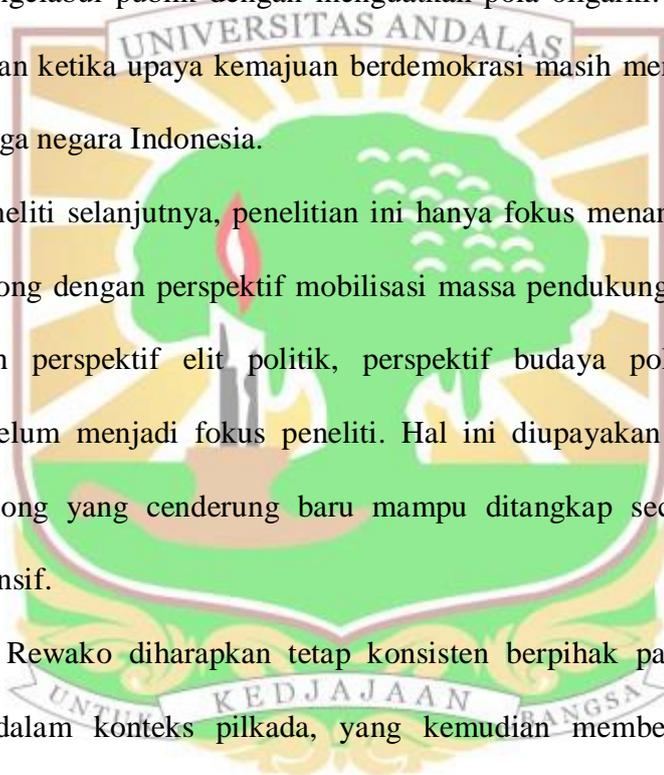
6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian tentang mobilisasi massa kelompok pendukung kolom kosong pada pilkada 2018 di Kota Makassar dan Kota Tangerang, melahirkan beberapa saran yang diajukan peneliti baik secara teoritik maupun secara praktis. Sebagai berikut;

1. Kajian terkait politik lokal dalam menangkap fenomena perkembangan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada perlu diperluas. Besarnya cakupan kajian partisipasi politik dalam penelitian ini membuat peneliti melihat bagaimana kemenangan dan kekalahan kolom kosong di Kota Makassar dan Kota Tangerang tidak lepas dari peran serta kelompok pendukung kolom kosong. Hal ini terpatri dari hadirnya Rewako di Kota Makassar dan JKK di Kota Tangerang sebagai bagian integral dari partisipasi masyarakat, mampu memberikan pengaruh dan perlawanan kepada situasi calon tunggal yang tidak dikehendaki. Bahwa proposal partai dan elit politik dalam bentuk calon tunggal mampu ditolak dan dilawan oleh masyarakat. Karena pada

prinsipnya, proposal calon yang diajukan pada pilkada harus mampu mewakili dan diterima oleh masyarakat sebagai pemilik kedaulatan lokal.

2. Kajian elit dan partai politik dalam penelitian ini justru membuktikan bahwa perlu adanya pembaharuan dan perubahan sikap/perilaku dalam berperan sebagai peserta politik. Mereka diberikan wewenang untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam menentukan calon yang diusung pada pilkada. Bukan justru mengelabui publik dengan menguatkan pola oligarki. Hal ini penting diperhatikan ketika upaya kemajuan berdemokrasi masih menjadi harapan di setiap warga negara Indonesia.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya fokus menangkap fenomena kotak kosong dengan perspektif mobilisasi massa pendukung kolom kosong. Sedangkan perspektif elit politik, perspektif budaya politik, perspektif yuridis, belum menjadi fokus peneliti. Hal ini diupayakan agar fenomena kotak kosong yang cenderung baru mampu ditangkap secara ilmiah dan komprehensif.
4. JKK dan Rewako diharapkan tetap konsisten berpihak pada tujuan yang edukatif dalam konteks pilkada, yang kemudian memberikan pengaruh kepada pihak manapun yang berusaha mengkristalkan motif-motif oligarki. Upaya ini mampu menjadi preseden bagi kelompok-kelompok di daerah lain dalam memobilisasi masyarakat agar turut terlibat dalam proses pilkada yang edukatif.



5. Penelitian ini sekiranya menjadi acuan bagi seluruh KPU di Indonesia termasuk KPU Kota Makassar dan Kota Tangerang, untuk lebih sigap dan bertanggung jawab atas segala perkembangan politik lokal khususnya fenomena kelompok kotak kosong yang kehadirannya kian meningkat.
6. Penelitian ini juga diharapkan menjadi semangat bagi masyarakat di seluruh Indonesia supaya mampu merespon situasi dan kondisi politik yang berkembang pada Pilkada di daerah. Peran masyarakat lokal perlu ditumbuhkan bahwa mereka lah yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan dalam menentukan pemimpin-pemimpin di daerah.

